



Dishub Koneksikan Desa Wisata

Sediakan Transportasi Antar-Wilayah

YOGYAKARTA—Dinas Perhubungan segera menyusun konsep transportasi guna mengakomodasi wisatawan yang hendak menuju desa wisata. Dengan konsep ini, antar-wilayah yang memiliki kampung wisata akan terhubung satu dengan lainnya.

"Di Yogyakarta ada 17 kampung wisata. Akses transportasi merupakan salah satu bagian penting pengembangan kampung wisata," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Golkari Made Yulianto, kemarin.

Dalam prosesnya, Dishub sedang menghitung berapa kebutuhan angkutan umum berbasis pariwisata dan berapa potensi jumlah penumpang tujuan kampung wisata. Selama ini angkutan umum di Kota Yogyakarta baru dilayani armada Trans Jogja dan bus kota. Namun, fakta di lapangan masih ada beberapa wilayah belum terjangkau oleh dua angkutan umum tersebut, termasuk tujuan ke kampung wisata.

"Untuk memastikan apakah konsep angkutan ke kampung wisata dibutuhkan atau tidak, dibutuhkan kajian. Termasuk jumlah dan seperti apa jenis angkutan yang akan dioperasikan jika angkutan tersebut sangat dibutuhkan," katanya.

Namun diakuinya, konsep yang nanti dibentuk Dinas Perhubungan tersebut tidak bisa

langsung dieksekusi. Pihaknya akan menyesuaikan dengan rencana DPRD Kota Yogyakarta yang berniat membuat regulasi penataan transportasi lokal. Salah satu kajian dari rencana peraturan daerah inisiatif dewan itu adalah pembatasan dimensi bus pariwisata yang masuk ke Kota Yogyakarta karena dinilai menjadi penyumbang kepadatan lalu lintas dan terbatasnya lahan parkir.

Saat ini wilayah yang sudah menerapkan larangan masuk bus pariwisata berukuran besar adalah di kawasan Jeron Beteng, Keraton Yogyakarta.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Imanuel Ardi Prasetyo mengatakan, meski belum ada jaminan kepadatan lalu lintas akan berkurang dengan ada regulasi penataan transportasi lokal, tapi tingginya volume kendaraan berdimensi besar yang melewati ruas jalan di Kota Yogyakarta bisa ditekan. Mengingat selama ini, kata dia, bus dimensi besar yang masuk wilayah perkotaan menjadi salah satu penyebab kepadatan lalu lintas.

"Kami sedang menyiapkan

regulasi, nanti berbentuk perda (peraturan daerah). Agar ada pijakan yang lebih terarah," katanya.

Menurutnya, wacana pelarangan bus dimensi besar masuk perkotaan karena kapasitas jalan tidak mungkin diperlebar lagi. Keterbatasan lahan parkir juga menjadi salah satu pemicu sehingga saat mengantarkan penumpang, bus hanya berputar-putar menunggu giliran parkir. "Kerangkanya masih umum, tapi nanti akan dipetakan titik-titik fasilitas halte bus yang dimensinya lebih kecil guna menampung penumpang bus besar," ujarnya.

Meski demikian, rencana membuat regulasi baru itu baru bisa diusulkan untuk dibahas tahun depan. Akan tetapi, kebijakan serupa yang sudah diterapkan di kawasan Jeron Beteng patut menjadi contoh karena hasilnya mampu mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama pada saat musim liburan.

Selain itu, dalam regulasi nanti moda transportasi lokal, seperti becak, andong, hingga sepeda ontel, akan diberikan fasilitas penunjang. Mulai dari akses jalan yang lebih tertata bagi kendaraan nonmotor hingga ketersediaan lahan untuk parkir.

"Regulasi ini sangat dibutuhkan sebagai dasar penataan. Selama ini hanya diberlakukan rekayasa lalu lintas namun hasilnya kurang optimal," katanya.

ristu hanafi

Lanjut
tanggapi
ketahui
ers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005